EFEKTIVITAS RELAWAN DEMOKRASI DI KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik

OLEH :

Yosi Witriya

1657020139

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
UJIAN MUNAQOSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Yosi Witriya dengan NIM 1657020139 yang berjudul **Efektivitas Relawan Demokrasi Di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, 5 Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Kun Budianto, M.Si	Afif Musthofa Kawwami,M.Sos
NIP. 197612072007011010	NIDN. 202709302

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Yosi Witriya

NIM : 1657020139

Judul : Efektivitas Relawan Demokrasi Di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari / Tanggal : Selasa /28 Agustus 2020

Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 24 Agustus 2020

DEKAN

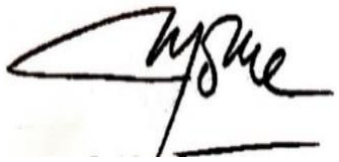

Prof. Dr. Izomiddin, M.A

NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA SIDANG

Dr.Ahmad Syukri,S.IP,M.Si

NIP. 197705252005011014

SEKRETARIS SIDANG

Ryllian Chandra Eka Viana, MA

NIP. 198604052019031011

PENGUJI I

Dr. Andi Candra Jaya,M.Hum

NIP. 197201192007011011

PENGUJI II

Reni Apriani,M.Si

NIDN. 2021049401

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yosi Witriya
NIM	1657020139
Tempat/TglLahir	: Epil,12 Mei 1997
Jurusan	: Ilmu Politik
JudulSkripsi	: **Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik,baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanski akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengakuan skripsi ini.

Palembang, 5 Juni 2020

Yosi Witriya
1657020139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"KEGAGALAN HANYA TERJADI BILA KITA MENYERAH"

PERSEMBAHAN

Karya tulisku ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Abrianto
2. Ibunda tercinta Sunarti,S.Pd.
3. Saudaraku tercinta Eka Wijayanti,S.Kep. dan Adjie Tri Ramadani
4. Pembimbingku Bapak Dr. Kun Budianto,M.Si dan Bapak Afif Musthofa Kawwami,M.Sos.
5. Teman-temanku Ilmu Politik D Angkatan 2016.

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Umum 2019.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran relawan KPU di Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Umum 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah satu orang ketua kelompok dari setiap segmen. Dari penelitian ini diketahui bahwa landasan terbentuknya program "Relasi" adalah partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Mekanisme kerja yang digunakan berbeda-beda yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Secara keseluruhan seluruh anggota Relasi telah bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Kendala yang di hadapi saat sosialisasi pada umumnya adalah gaya bahasa, teknik, waktu, dan mental. Selain itu pola pikir masyarakat yang belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya demokrasi.

Kata kunci : Relasi, Pemilu, KPU.

ABSTRACT

This research was about the effectiveness of democracy volunteers in the city of Palembang in increasing political participation in the 2019 General Election. This research aimed to find out how the role of KPU volunteers in the city of Palembang in increasing political participation in the 2019 General Election. The used research method on this research was a qualitative research method . Data was obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. The subjects on this research were one group leader from each segments. From this research it was known that the foundation for the formation of the "Relationship" program was voter participation which tended to decrease. The working mechanism used was different, it was adjusted to the situation and conditions needed. Overall, all Relationship members have worked according to their function as extension agents. Constraints was faced at the time of socialization in general were the style of language, technique, time, and mentality. In addition, the mindset of people who didnot have an awareness of the importance of democracy.

Keywords: Relations, Elections, KPU.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
KATA PENGANTAR xii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Tinjauan Pustaka 10
F. Kerangka Teori 13
G. Metodologi Penelitian 16
1. Pendekatan/Metode Penelitian 17
2. Data dan Sumber Data 17
3. Teknik Pengumpulan data 18
4. Sistematika Penulisan Laporan 21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 23
A. Sejarah Singkat Kota Palembang 23
B. Keadaan Geografis 24
C. Demografi 26
D. Pemilu 2019 28
E. KPU (Komisi Pemilihan Umum) 29
F. KPU Kota Palembang 30

G. Visi dan Misi KPU 31
H. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU 31
I. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 35
J. Dasar Hukum 36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 38
A. Efektivitas Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019..... 38
B. Hambatan Yang di Hadapi Relawan KPU di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik..... 62
BAB IV PENUTUP..... 68
A. KESIMPULAN 68
B. SARAN..... 69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Palembang 7
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kota Palembang Tahun 2019 27
Tabel 2.2 Persentase Partisipasi Pada Pemilu 2019 Kota Palembang Berdasarkan 18 Kecamatan 28
Tabel 3.1 Jumlah Pelamar Relawan Demokrasi berdasarkan Basis 40
Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Relawan Demokrasi di Kota Palembang 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palembang 24
Gambar 2.2 Struktur Komisioner KPU Kota Palembang 30
Gambar 3.1 Pendaftaran Relawan Demokrasi 39
Gambar 3.2 Sesi Wawancara Relawan Demokrasi 40
Gambar 3.3 Persyaratan Relawan Demokrasi 41
Gambar 3.4 Segmen Relawan Demokrasi 48
Gambar 3.5 Sosialisasi ke Sanggar Liberty Sako 48
Gambar 3.6 Sosialisasi ke MAN 1 Palembang 49
Gambar 3.7 Sosialisasi ke Sanggar Senam BPKAJ 51
Gambar 3.8 Sosialisasi ke Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa 52
Gambar 3.9 Sosialisasi ke Panti Jompo Tresna Wedha 53
Gambar 3.10 Sosialisasi ke Pedestrian Sudirman 54

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul, ***"Efektivitas Relawan Demokrasi Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019"*** Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir akhir Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulis skripsi ini. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof.Drs.H.M.Sirozi,MA.,Ph.D sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, Prof.Dr.Izomiddin,M.A;
3. Wakil Dekan I Dr.Yenrizal,M.Si.
4. Wakil Dekan II Ainur Ropik,M.Si.
5. Wakil Dekan III Dr.Kun Budianto,M.Si sekaligus Pembimbing I
6. Ketua Prodi Ilmu Politik Dr. Ahmad Syukri,S.IP,M.Si
7. Afif Musthofa Kawwami,M.Sos Sekretaris Prodi Ilmu Politik sekaligus Pembimbing II.
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
9. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

10. Kedua orangtuaku yang menjadi penyemangat hidupku.
11. Semua pihak yang terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 5 Juni 2020

Penulis

Yosi Witriya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi dikarenakan rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintah. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangan nya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa. Perubahan model sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah.

Masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa selama ini pemilu hanya sebagai agenda rutinitas lima tahunan yang menghabiskan uang rakyat, sementara hasil dari pelaksanaan pemilu itu sendiri belum mampu mencipatakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Anggapan seperti ini tentunya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk lebih baik

dalam melaksanakan agenda pemilu di masa yang akan datang.[1]

Indonesia telah berulang kali menyelenggarakan pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada hakikatnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sarana partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu pada awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD dipilih langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah. Tahun 2014 , dengan pelaksanaan terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, selanjutnya pada waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.Untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 2019, dilaksanakan pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sertapara anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.[2]

Salah satu bentuk kepastian hukum pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk membentuk peraturan KPU sehingga jalannya proses

[1]Triono,(2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik, Volume 2 No. 2,h. 156-157.

[2] Ratna Herawati,DKK,(2018).Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang,Volume 4 no 3,h.830-831.

penyelenggaraan pemilu lebih demokratis. Di sisi lain, sering kali munculnya Peraturan KPU menyebabkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peraturan KPU menjamin kepastian hukum pemilu, khususnya dalam pemilu 2019.

Pemilihan umum (Pemilu) yang digelar pada tahun 2019, sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Hal ini tentu berbeda, perbedaan tersebut menyertai teknis penyelenggaraan yang dilakukan, sehingga membutuhkan kesiapan perencanaan yang matang, ketersediaan aparatur penyelenggara yang cukup dan memiliki kompeten, serta dukungan sistem yang baik.[3]

Pelaksanaan pemilu 17 April 2019 secara umum relatif berlangsung damai berjalan tertib walaupun ada beberapa kasus misalnya kekurangan surat suara keterlambatan di dalam proses distribusi dan seterusnya namun secara umum bahwa pemilu 2019 ini telah memberi gambaran positif partisipasi politik yang kemungkinan dapat dikatakan meningkat dibanding pemilu sebelumnya.[4]

Kehidupan masyarakat pada saat ini selalu menginginkan kemudahan dalam hidupnya. Tak terkecuali dalam hal memilih pemimpin. Masyarakat sudah pastinya menginginkan pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa. Namun, seringkali masyarakat mengartikan tindakan para penguasa

[3]Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,(2019).Rumah Pintar Pemilu,Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi)Pemilu,kaltim:h.1-3

[4] Immanuel Christian,Menyikapi Proses dan Hasil Pemilu 2019, http://m.rri.co.id/post/berita/663081/kolom_bicara/menyikapi_proses_dan_hasil_pemilu2019.html,diakses tanggal 12 Juli 2019

dan elite politik hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Misalnya pada masa kampanye, pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan hati rakyat dengan berbagai cara. Dalam konteks ini yang terjadi adalah budaya *money politic* dan penyebaran isu-isu yang belum tentu kebenarannya sering kali dipraktikan oleh para pejabat. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa pilpres tahun 2019 ini adalah *rematch* atau tanding ulang Pilpres 2014.[5]

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan.[6]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar

[5] Khoiril Huda,DKK,(2018). Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa,Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 No 3, h.550.

[6] Daud.M.Liando,(2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 No 2,h. 15.

kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 persen. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan stakeholders terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk daftar calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu.Karena itu, partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat.[7]

Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu 2019 lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan pemilu. Pemilih berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau *invalid vote* dalam pemilu.[8]

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diatur oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), baik KPU Provinsi, dan maupun KPU Kabupaten/Kota, sebagai lembaga pengawas pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai penyelenggaraan dalam

[7] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,(2019).Rumah Pintar Pemilu, Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi) Pemilu,kaltim: h.1-2

[8] Ibid.,

pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Maka dari itu, Untuk meningkatkan kualitas pemilu maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) membuat suatu program yaitu Relawan Demokrasi/Relawan KPU untuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih.

Program relawan demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor/*pioneer* demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah menunjukan indikasinya, yaitu:

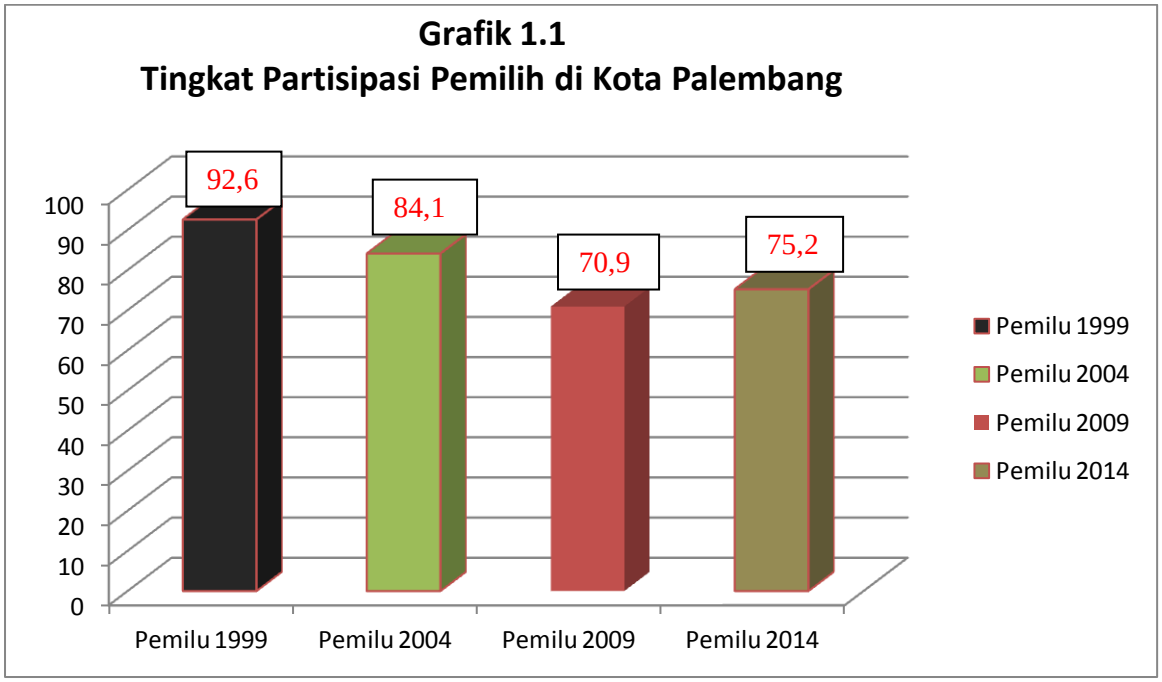

Sumber : Diolah Peneliti

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1999 tingkat partisipasi pemilihnya adalah 92,6%. Lalu pada Pemilih tahun 2004 tingkat partisipasi memilih cukup memprihatinkan yakni turun hingga 84,1%. Pada Pemilu tahun 2009 tingkat partisipasi politik memilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9%. Dan pada Pemilu tahun 2014 cukup meningkat dari tahun 2009 yaitu tingkat partisipasi memilihnya adalah 75,2%.

Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program relawan demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok

masyarakat yang berasal dari 10 (sepuluh) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih pemuda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.[9]

Program Relawan Demokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Di sisi lain, harus ada upaya untuk meningkatkan partisipasi dimana upaya antisipasi atas situasi kejenuhan dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnyakesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan dapat lebih baik dibandingkan

[9]Ibid., h.2

pemilu-pemilu sebelumnya.[10]

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak mudah. Di perlukan usaha yang keras dari Anggota Relawan Demokrasi tentunya akan menemui kendala-kendala yang harus dihadapi. Dan sudah menjadi bagian dari tanggung jawab mereka pula untuk mencari solusi dari kendala tersebut demi meraih target yang di inginkan.[11]

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas relawan demokrasi di Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2019?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi relawan KPU di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi Relawan

[10]Komisi Pemilihan Umum,(2017).Relawan Demokrasi (Relasi),"Relawan Pilgub DKI di Monas",
[11]Weni Wahyu Widyastuti,(2014). Peran Relawan Demokrasi dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif di Kota Malang,Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang,Volume 1 nomor 1.

Demokrasi di Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik dan menjadi bahan referensi bagi peneliti-penelitiselanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai Relawan Demokrasi dalam meningkatkan Partisipasi Politik.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru,sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Relawan Demokrasi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan hasil-hasil penelitian yag telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut:

Triono *"Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019"*.[13]Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintah. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan

rahasia.Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa. Perubahan model sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah.

Komisi Pemilihan Umum *"Relawan Pilgub DKI di Monas,Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017".* [12] Program Relawan Demokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakan masyarakat tempat mereka berada, agar maumenggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Ratna Herawati *"Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesai".*[13]Indonesia telah berulang kali menyelenggarakan pemilu yang

[12]Komisi Pemiliohan Umum,(2017).Relawan Demokrasi (Relasi),"Relawan Pilgub DKI di Monas",Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,h-3.

[13]Ratna Herawati,DKK,(2018).Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri

disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada hakikatnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sarana partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk Peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaran pemilu lebih demokratis. Di sisi lain, seringkali munculnya Peraturan KPU menyebabkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Peraturan KPU menjamin kepastian hukum Pemilu, khususnya dalam Pemilu 2019.

Daud M.Liando *"Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat".* [14] Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Di Indonesia saat ini penggunaan kata

Semarang,Volume IV no 3,h.830-831.

[14]Daud M. Liando,(2016).Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat,Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum,Volume 3 Nomor 2,h.15.

partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *"Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi) Pemilu th 2019".*[15]Pemilihan umum (Pemilu) yang digelar pada tahun 2019, sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Hal ini tentu berbeda, perbedaan tersebut menyertaiteknis penyelenggaraan yang dilakukan, sehingga membutuhkan kesiapan perencanaan yang matang, ketersediaan aparatur penyelenggara yang cukup dan memiliki kompeten, serta dukungan sistem yang baik.

F. Kerangka Teori

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiyah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Abdul rahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.[16]

Dari pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atas sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun progaram. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah

[15]Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,(2019).Rumah PintarPemilu,Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi) Pemilu, kaltim:h.1.3

[16]Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), hal. 92

ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat, yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".[17]

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun,jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidaktepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagaii berikut.[18]

a. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi

[17]Soewarno Handayaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15

[18]M. Richard steers, Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Air Langga, 1999) hal. 159

fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

b. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan interen pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

c. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja.Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

Menurut Gibson, Efektivitas adalah pencampaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.[19] David J. Lawless dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektifitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja

[19] Gibson JL JM Invancevich,JH Donnelly,Organisasi,terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.

sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

3. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

Melalui sinergritas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.[20]

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semkain mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.[21]

Kenapa peneliti memakai teori Efektivitas dari Gibson ini karena cocok untuk digunakan menganalisis permasalahan yang ada dilapangan dan sama-sama ingin mengetahui pencampaian tujuan dan sasaran untuk mencapai usaha tersebut,karena tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang yang telah dikeluarkan.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Itu mungkin dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi

[20] http://al-bantany-112.blogspot.com,2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html
[21] Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2002)

oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika dibelakang mereka, para peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik penelitian tetapi juga metodologi.[22]berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. **Pendekatan/Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan dan menghasilkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan teori dan konsep berdasarkan data yang didapat. Peneliti menggunakan metode dengan tujuan untuk menyelidiki program atau aktivitas dari individu maupun kelompok, berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti. Kemudian peneliti memaparkan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk rangkaian kata-kata. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk meneliti objek kajian.[23]

2. **Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data *primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung, mengamati dan mencatat segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan Efektivitas Relawan

[22]C.R Kothari, (1990). Reseach Methodologi, Methods dan techniques (Second Revises Edition), india: Age International, hal.8

[23]Nanang Martono, (2015). Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.11

Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik.

Selain itu data primer pada penelitian ini juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan. Ke para informan tersebut diajukan beberapa pertanyaan untuk mencari tahu Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. Selanjutnya data *sekunder* atau data penunjang dalam penelitian diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini antar lain berupa buku, jurnal, foto-foto, dokumen dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai.[24] Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang rinci, berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi anggota Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.

Adapun yang menjadi informasi atau sumber informasi dari penelitian ini adalah Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), Anggota Relawan Demokrasi (Perwakilan dari 10 basis),Kasubag Bagian Teknis KPU, Kasubag Umum KPU, Masyarakat yang di datangi oleh anggota- anggota

[24]Sutrisno Hadi, (1987), Metdhologi Reseach II, Yogyakarta: Andi Offiset, hal.193.

Relawan Demokrasi dari setiap basis.

2. Dokumentasi

Secara sederhana dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari suatu kegiatan yang menyangkut dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, file, poto, video, atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung.[25] Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk gambar, jurnal, dan data lainnya berhubungan dengan Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan suah di tetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.

Adapun lokasi penelitian dari penelitian ini adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palembang Sumatera Selatan. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah orang-orang dan segalanya sesuatu yang terlibat dalam Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi

[25]Nanang Martono. (2016). Metode Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 80

lapangan, dan dokumentasi. Kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.[26]

Di dalam analisis data kualitatif menurut Nanang Martono teknik analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini antara lain menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari informan, data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap, serta dokumentasi, hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada dilapangan, bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. Pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang didapat melalui wawancara dari informan.

3. Penyajian Data

Penyajian data berupa aktifitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh,

[26]Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD. Bandung: Alfabeta,h.244.

penyajian data cenderung mengaruh pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses merumuskan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya yaitu data yang telah direduksi atau yang telah disajikan, pada tahap ini peneliti bertugas menggambarkan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam kesimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam sebuah penelitian tentu adanya tahapan-tahapan atau sistematika yang dijadikan panduan dalam penelitian sistematika laporan yang akan peneliti buat terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang di rangkum dalam 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, jenis penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data ata, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian dalam Peran Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, dibahas mengenai proses analisis dari data serta informasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya, data-data yang telah didapat akan peneliti analisa dengan menggunakan alat analisi berupa Teori Efektivitas. Sehingga peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang biasa yang dilakukan oleh pihak yang terlibat.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Palembang

Palembang adalah ibu Kota Sumatera Selatan, Indonesia. Kota ini merupakan kota tertua yang ada di Indonesia, yang berasal dari abad ke-7. Palembang digabungkan ke dalam Hindia Belanda pada tahun 1825 setelah penghapusan Kesultanan Palembang. Palembang diberi status sebagai kota pada 1 April 1906. Palembang kini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera dan kota terbesar kesembilan di Indonesia. Kota ini telah menjadi tuan rumah dari beberapa acara internasional, termasuk Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 dan Pesta Olahraga Asia 2018.[27]

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang yang tergenang oleh air.

Karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air, sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat

[27]https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Palembang diakses tanggal 20 agustus 2019

yang digenangi oleh air.[28]

B. Keadaan Geografis

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan :[28]

a. Batas Utara : KabupatenBanyuasin

b. Batas Selatan : Kabupaten Ogan KomeringIlir

c. Batas Timur : KabupatenBanyuasin

d. Batas Barat : KabupatenBanyuasin

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Palembang

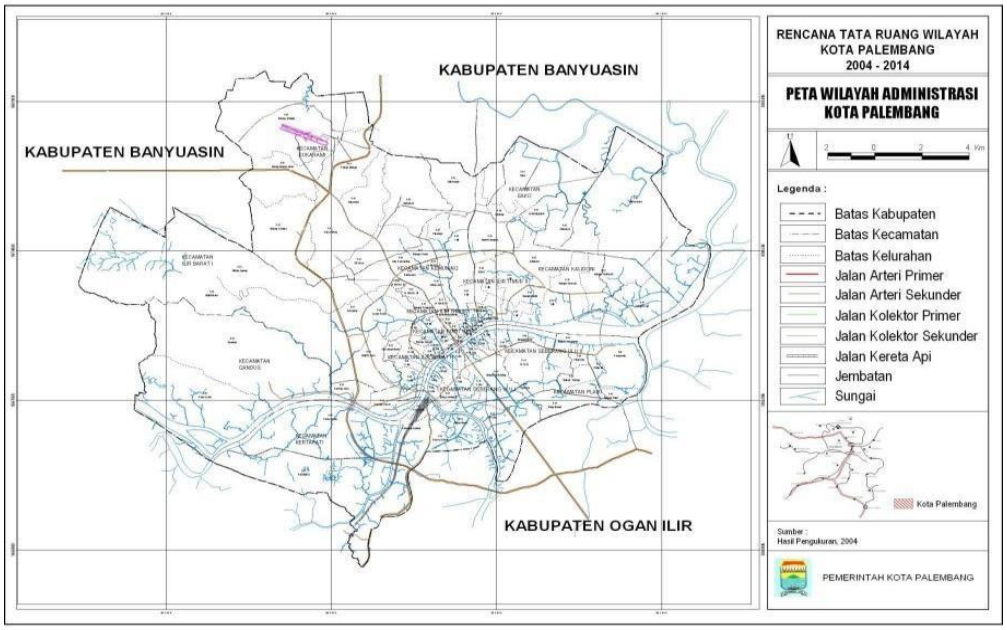

Sumber : BPS Kota Palembang

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2^{o} 52′ sampai 3^{o} 5′ Lintang Selatan dan 104^{o} 37′ sampai 104^{o} 52′ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter

[28]Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah, diakses tanggal 17 september 2019.

dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km^2 yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.

Keadaan alam kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21^o–32^o Celsius, curah hujan 22 – 428 mml per tahun. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi kawasan lindung yang ada di Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hutan (5,68%) dan rawa (3,83%). Untuk hutan sendiri terdiri dari berbagai jenis guna lahan, diantaranya adalah kawasan cagar alam (46,91 Ha) dan kawasan cagar budaya (21,75 Ha). Berdasarkan kondisi geologi, Kota Palembang memiliki relief yang beraneka ragam terdiri dari tanah berupa lapisan aluvial dan lempung berpasir. Di bagian selatan kota, batuan berupa pasir lempung yang tembus air, sebelah utara berupa batuan lempung pasir yang kedap air, sedangkan sebelah barat berupa batuan lempung kerikil, pasir lempung yang tembus air hingga kedap air.

Dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi

II).Ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter; Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter.[29]

C. Demografi

1. Penduduk

Kota Palembang memiliki 18 kecamatan diantaranya yaitu:

a. Kecamatan Alang-Alang Lebar.
b. Kecamatan Bukit Kecil.
c. Kecamatan Gandus.
d. Kecamatan Ilir Timur I.
e. Kecamatan Ilir Timur II.
f. Kecamatan Ilir Timur III.
g. Kecamatan Ilir Barat I.
h. Kecamatan Ilir Barat II.
i. Kecamatan Kalidoni.
j. Kecamatan Kemuning.
k. Kecamatan Kertapati.
l. Kecamatan Plaju.
m. Kecamatan Sako.
n. Kecamatan Seberang Ulu I.
o. Kecamatan Seberang Ulu II.
p. Kecamatan Sematang Borang.
q. Kecamatan Sukarame.[30]
r. Kecamatan Jakabaring

[29]Portal Resmi Pemerintahan Kota Palembang, Geografis kota Palembang. Di akses tanggal 17 september 2019.

[30]https://halokawan.com/jumlah-daftar-nama-kecamatan-di-kota-palembang/,

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Ilir Barat II	71.267
2	Gandus	64.020
3	Seberang Ulu I	91.619
4	Jakabaring	89.597
5	Kertapati	90.791
6	Seberang Ulu II	104.209
7	Plaju	88.265
8	Ilir Barat I	137.863
9	Bukit Kecil	48.874
10	Ilir Timur I	77.102
11	Kemuning	91.419
12	Ilir Timur II	93.352
13	Ilir Timur III	83.640
14	Kalidoni	111.030
15	Sako	91.754
16	Sematang Borang	35.821
17	Sukarami	155.590
18	Alang-Alang Lebar	96.886
Jumlah		**1.623.099**

Sumber : BPS Palembang

D. Pemilu 2019

Kota Palembang telah melaksanakan Pemilu 2019 pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Persentase Partisipasi Pada Pemilu 2019 Kota Palembang dari 18 kecamatan:

Kecamatan	Presiden & Wakil Presiden	DPRD Kab/Kota
Ilir Barat I	80,7	81,21
Ilir Barat II	82,6	84,37
Seberang Ulu I	81,0	82,21
Seberang Ulu II	84,8	85,61
Jakabaring	81,1	82,62
Ilir Timur I	74,8	74,98
Ilir Timur II	68,6	73,19
Ilir Timur III	78,8	79,04
Sukarami	83,5	84,74
Sako	84,5	85,85
Kemuning	80,6	81,30
Kalidoni	83,2	83,77
Bukit Kecil	69,1	69,42
Gandus	85,3	85,91
Kertapati	83,5	84,25
Plaju	81,1	81,41
Alang-Alang Lebar	87,6	88,24

Sematang Borang	76,8	78,67
Jumlah	82,2%	81,99%

Sumber : KPU Kota Palembang

E. KPU (Komisi PemilihanUmum)

KPU merupakan lembaga di bawah naungan negara yang menyelenggarakan pemilihan umum. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Komisi Pemilihan Umum hadir sebagai wadah untuk melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, antara lain adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD, dan untuk pemilihan umum kepala daerah beserta wakil kepala daerah. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non- partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22

Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.

F. KPU Kota Palembang

Gambar 2.2

Struktur Komisioner KPU Kota Palembang 2019-2024

Sumber: KPU Kota Palembang

G. Visi dan Misi

VISI:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

MISI :

a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya mencipatakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnyauntukseluruh masyarakat.
d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.[31]

H. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU

KPU bertugas:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
b. Menyusun tata kerja KPU,KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota,PPK, PPS,KPPS,PPLN, dan KPPSLN.Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.

[31]https://kota-palembang.kpu.go.id/?page_id=191, diakses tanggal 18 september 2019

c. Mengoordinasikan, dan memantau semua tahapan pemilu.

d. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

f. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu.

g. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.

h. Menindak lanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.

i. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan, dan

k. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

KPU berwenang:

a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, danKPPSLN.
b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
c. Menetapkan peserta Pemilu.
d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU

Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, danPPLN.
i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu dan
l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[32]

[32]https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/Tugas-dan-Kewenangan, di akses tanggal 18 september 2019

KPU Berkewajiban:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu.
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.
c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
d. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia.
f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
i. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu.
j. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional.
k. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
l. Melaksanakan putusan DKPP dan melaksanakan kewajiban lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[33]

I. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

a. Relawan Demokrasi

Program Relawan Demokrasi digagas sejak tahun 2014, Di Indonesia fenomena tidak memilih secara benar (golongan putih atau golput) justru menjadi semakin tren. Untuk mengantisipasi jumlah golput yang semakin banyak pada pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan program bernama "Relawan Demokrasi". Program ini diterapkan diseluruh Kabupaten/kota di Indonesia,Termasuk di Kota Palembang yang dinamakan dengan Relawan Demokrasi Kota Palembang.

Relawan Demokrasi direkrut dari orang-orang yang mempunyai kepedulian pada demokratisasi dan pemilu. Relawan ini harus berasal atau tergabung komunitas dimana komunitas/perekumpulan tersebut mempunyai kegiatan ataupun pertemuan secara reguler.Peran Relawan ini diharapkan akan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat khususnya pada komunitas masing-masing perihal demokrasi dan pemilu. Langkah KPU dengan membentuk Relawan Demokrasi ini menjadi satu langkah terobosan yang positif dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Langkah terobosan ini cukup menarik karena program ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan KPU sebelumnya sebagai bentuk kegiatan sosialisasi Pemilu.

Pembentukan Relawan Demokrasi juga berangkat dari rasa kekhawatiran KPU sebagai penyelenggara Pemilu akan rendahnya angka parrtsipasi masyarakat untuk mengikuti Pemilu. Dalam beberapa pemilihan sebelumnya, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya cukup

[33]https://kota-payakumbuh.kpu.go.id/?page_id=279, diakses tanggal 18 september 2019

tinggi. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena telah munculnya sikap apatis di tengah-tengah masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu. Di tengah-tengah apatisme masyarakat terhadap Pemilu tersebut merupakan tantangan yang berat bagi Relawan Demokrasi untuk membangun kembali kesadaran masyarakat di tingkat bawah untuk dapat menggunakan hak politik dan mendongkrak partisipasi politik rakyat dalam pelaksanaan Pemilu. Program Relawan Demokrasi pada Pemilu kali ini diharapkan dapat bekerja dan bersosialisasi lebih baik lagi dari pada sosialisasi sebelumnya (2014).

Tujuan Relawan Demokrasi yaitu:

a. Meningkatkan kualitas proses pemilu
b. Meningkatkan partisipasi pemilih
c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan Demokratisasi.[34]

Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang:

a. Pentingnya demokrasi,pemilu dan partisipasi.
b. Tanggal,hari dan jam pemungutan suara.
c. Tata cara pemberian suara dalam pemilu.[35]

J. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109).

[34]Pedoman Pelaksanaan Relasi, Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019, h. 4
[35]Ibid.,h.7

2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun2010.
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota.
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang Efektivitas Relawan Demokrasi Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2019,dan apa saja hambatan yang dihadapi Relawan Demokrasi di kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu 2019,dengan menggunakan teori efektivitas dari Gibson. Pemilu di laksanakan dengan partisipasi masyarakat. Poin tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan Pemilu. Tanpa partisipasi masyarakat, maka sebenarnya Pemilu tidak memiliki arti. Ukuran partisipasi tentu bukan hanya kehadiran pemilih dalam memberi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, tetapi keterlibatan pemilih pada semua tahapan Pemilu.

a. Efektivitas Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019

Program Relawan Demokrasi yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum sejak Pemilu 2014, terbentuknya Program Relawan Demokrasi ini didasarkan karena tingkat partisipasi memilih yang mengalami banyak penurunan dan diharapkan program ini dapat membantu untuk meningkatkan tingkat partisipasi lebih tinggi lagi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam melaksanakan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 097/PP.08-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019, tanggal 9 Januari 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang melaksanakan beberapa tahapan :

1. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal 10-15 Januari

2019, jam 08.00 WIB sampai dengan selesai melalui email:humas.kpukotapalembang@gmail.com atau bisa menyerahkan langsung ke kantor KPU Kota Palembang di Sub Bagian Teknis atau Hupmas.

2. Seleksi administrasi, dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019.
3. Pengumuman lulus administrasi, dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019.
4. Wawancara, dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019,dan
5. Pengumuman lulus tahap akhir, dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019.[36]

Gambar 3.1

Pendaftaran Relawan Demokrasi

Sumber: KPU Kota Palembang

Selama masa penerimaan pendaftaran, Komisi pemilihan Umum Kota Palembang menerima pelamar sebanyak 273 orang, dengan rincian sebagai berikut:

[36]Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi KPU Kota Palembang, h. 2

Tabel 3.1

Jumlah Pelamar Relawan Demokrasi berdasarkan Basis

BASIS	JUMLAH PELAMAR
Warga Internet	24 orang
Komunitas	28 orang
Perempuan	27 orang
Keagamaan	11 orang
Marjinal	11 orang
Berkebutuhan Khusus	9 orang
Penyandang Disabilitas	14 orang
Keluarga	15 orang
Pemula	81 orang
Muda	53 orang

Sumber: Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Gambar 3.2

Sesi Wawancara Relawan Demokrasi

Sumber : KPU Kota Palembang

Selanjutnya KPU Kota Palembang melakukan seleksi wawancara dilaksanakan kepada pelamar yang dinyatakan lulus administrasi, sebanyak

243 orang. Wawancara dilaksanakan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Dari hasil wawancara akan di seleksi untuk 55 orang Relawan Demokrasi, yang diputuskan melalui Rapat Pleno KPU tanggal 17 Januari 2019. Selanjutnya, para anggota Relawan Demokrasi yang terpilih akan melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat sesuai basisnya masing-masing di Kota palembang.

Gambar 3.3

Ketentuan dan Persyaratan Relawan Demokrasi

Sumber: KPU Kota Palembang

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 10 Januari 2019, dengan salah satu perjanjian yaitu mengumumkan pembentukan Relawan Demokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota palembang secara terbuka kepada warga negara (melalui papan pengumuman atau website),kemudian diwujudkan melalui surat Pengumuman KPU Kota palembang tentang pendaftaran Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih memiliki tugas penting

dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Berkaca pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018, kelemahan metode sosialisasi dan Pendidikan pemilih saat itu yaitu tidak adanya ujung tombak yang langsung menyasar ke segmentasi masyarakat tingkat paling bawah (langsung terjun ke masyarakat), dengan kata lain Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang hanya berfokus pada metode tatap muka yang dilaksanakan di tempat tertentu dengan intensitas yang minim.

Maka dari itu, dengan adanya Relawan Demokrasi akan sangat memudahkan metode sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang menyasar kepada segmentasi masyarakat di tingkat bawah secara langsung. Guna meningkatkan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, Relawan Demokrasi mengikuti pelatihan dengan materi:

a. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.

b. Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis.

c. Kode etik relasi.

d. Teknik komunikasi publik.

e. Materi lain yang sesuai.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya,relawan demokrasi menyampaikan materi tentang:

a. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.

b. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara.

c. Tata cara pemberian suara dalam pemilihan umum.

d. Perkenalan peserta Pemilu.

Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi:

a. Memetakan varian kelompoksasaran.

b. Identifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.

c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.

d. Menyusun jadwal kegiatan dan bekerja sama dengan relawan Pemilu yang lain.

e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.

f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kota Palembang.

Agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan, Relawan Demokrasi di wajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:

a. Bersikap independen, imparsial, dan non partisan terhadap peserta pemilu.
b. Bertindak santun dan berperilaku baik.
c. Menghormati adat dan budaya setempat.
d. Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukan keberpihakan kepada peserta pemilu.
e. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau Gratifikasi dari peserta Pemilu.

Alokasi anggaran kegiatan program Relawan Demokrasi untuk membiayai 55 orang relawan, bersumber pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasinya tanpa membebani anggaran DIPA KPU.

Tabel 3.2

Daftar Pelaksanaan Kegiatan Relawan Demokrasi di Kota Palembang

Basis	Bentuk Kegiatan	Kelompok Sasaran	Jumlah Peserta	Waktu dan Tempat
Internet	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Warnet		Kamis, 14 Maret 2019.
Komunitas	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Komunitas se-Kota Palembang	100 orang	Sabtu, 16 Maret 2019. Atrium Opi Mall.
Perempuan	Sosialisasi	Pemilih	30	Rabu, 27
	dengan Instruktur SenamKota Palembang	Perempuan di BPKAJ	orang	Maret 2019. Sanggar BPKAJ

Keagamaan	Sosialisasi Pemilih Pemula Dalam Menghadapi Pemilu 2019	Pemilih Muda	40 orang	Senin, 8 April 2019. Masjid Agung Kota Palembang. Gerakan Mahasiswa Khatolik Indonesia di Bina Praja Sumsel
Marjinal	Sosialisasi Bersama Warga Sekitar	Seluruh Warga di Sekotaran TPA	35 orang	Rabu, 6 Maret 2019. TPA (Tempat Pembuangan Akhir)Karya JayaKertapati
Berkebutuhan Khusus	Sosialisasi Pemilih Pemilu 2019	Warga Panti Jompo Tresna	60 orang	Senin, 25 Maret 2019. Panti Jompo

	Bersama Warga Lansia	Wedha		Tresna Wedha

Penyandang Disabilitas	Sosialisasi Kepada Kelompok Disabilitas	Kelompok Disabilitas	60 orang	Senin, 25 Februari 2019. Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa
Keluarga	Sosialisasi Pendidikan Pemilu Bersama Warga Sako	Sebagian Warga Sako	45 orang	Sabtu, 6 April 2019. Sanggar Ratu Liberty Sako
Pemula	Pendidikan Pemilih Pemula	Seluruh Siswa/i di SMA Srijaya Negara Palembang SMA Negeri 2 Palembang SMA Plus 17 Palembang SMANegeri 1Palembang	50 orang 30 orang 250 orang 40 orang	Sabtu, 2 Maret 2019 Rabu, 13 Maret 2019 Rabu, 13 Maret 2019 Jum'at, 8 Maret 2019

Muda	Sosialisasi Bersama Pemuda Rantau Menghadapi Pemilu 2019	Pemuda Rantau	30 orang	Selasa, 5 Maret 2019. UIN Raden Fatah Palembang

Sumber: Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Evaluasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan dari Relawan Demokrasi:

1. Terlalu singkat waktu pembentukan Relawan Demokrasi, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Memiliki waktu yang sedikit untuk me-manage jumlah peserta yang banyak.
2. Perlu di perhatikan ada mekanisme pergantian antar waktu terhadap kinerja Relawan Demokrasi yang di anggap kurang maksimal.
3. Perlu di buatkan standar operasional prosedur untuk masing-masing basis dengan target capaian tertentu.

Selanjutnya, para Relawan Demokrasi akan melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat sesuai basisnya masing-masing di Kota Palembang. Pekerjaan Relawan Demokrasi sebagai subjek yang melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Relawan Demokrasi dibentuk pada setiap kabupaten/kota dibatasi 55 orang bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dan menurunnya angka suara tidak sah. Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sesuai PKPU

Nomor 10 Tahun 2018, pasal 5 ayat 1 huruf a,[37] yang dilakukan anggota Relawan Demokrasi meliputi 10 (sepuluh) basis yaitu:

Gambar 3.4

Segmen Relawan Demokrasi

Sumber: KPU Kota Palembang

1. Basis Keluarga

Gambar 3.5

Sosialisasi ke Sanggar Liberty Sako

Sumber: KPU Kota Palembang

[37] https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/08/kpu-relawan-demokrasi-efektif-jalankan-tugasnya-sosialisasikan-pemilu-2019,diakses tanggal 20 september 2019

Basis keluarga sebagai salah satu orientasi pergerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan keluarga merupakan unit sosial-ekonomi paling kecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari segala institusi. Keluarga merupakan kelompok penting yang terdiri lebih dari dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Pada akhirnya semua basis keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing. Contoh bentuk kegiatan basis ini adalah sosialisasi ke ibu-ibu arisan, perkumpulan tingkat RT/RW, dan lainnya.[38]

2. Basis Pemilih Pemula

Gambar 3.6

Sosialisasi ke MAN 1 Palembang

Sumber: KPU Kota Palembang

Sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan oleh pemilih pemula. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang memakai hak pilihnya ketika pertama kalinya memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilihan umum berikutnya. Pemilih pemula adalah orang yang akan memasuki usia memilih dan akan mempergunakan hak pilihya untuk pertama kali dalam pemilu.

[38]Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu Tahun 2019, h. 12

Dengan siklus pemilu di Indonesia yang di laksanakan setiap lima tahun sekali, maka kisaran umur pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa/i merupakan elemen terpenting di dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka miliki potensi terbesar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai cakrawala yang luas diantara masyarakat.

Contoh bentuk kegiatan basis ini adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat).[39]

3. Basis Pemilih Muda

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam bagian pemilih yang cukup signifikan. Dalam bentuk pemilu, mereka yang dikatakan basis pemilih muda adalah warga Indonesia yang telah memiliki hak pemilih dan umurnya tidak melebihi 30 tahun. Maka, kisaran umur pemilih muda antara 22 tahun sampai 30 tahun.

Pemilih muda baik yang mempunyai status mahasiswa, pekerja ataupun belum bekerja penting mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi bagan pemilih dalam jangka waktu yang cukup lama. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan supaya tidak terkena oleh apatisme ataupun pragmatisme politik yang pada ujungnya akan merusak kualitas demokrasi.

Contoh bentuk kegiatan basis ini adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi pemuda, mahasiswa/i kampus dan sebagainya.[40]

[39]Ibid.
[40]Ibid., h.14

4. Basis pemilih perempuan

Gambar 3.7

Sosialisasi ke sanggar senam BPKAJ

Sumber: KPU Kota Palembang

Basis pemilih perempuan jadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka bukan hanya memainkan peran strategis dalam menjaga dan mendidik anak ketika mereka jadi ibu rumah tangga. Tapi juga dapat memainkan tugas untuk memotivasi dan mengedukasikan lingkungan,setidaknya pada komunitasnya. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuat keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan pengetahuan politik si anak, memberikan kecakapan-kecakapan untuk melakukan pengetahuan politik si anak, serta membuat mereka lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam politik ketika menjadi dewasa.

Alasan dijadikan perempuan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah:

a. Jumlah pemilih perempuan berimbang dengan jumlah pemilih laki-laki,namun kapasitasnya masih terbatas dibandingkan laki-laki.
b. Tingkat pengetahuan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki.

Contoh bentuk kegiatan basis ini adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu kompleks.[41]

5. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Gambar 3.8

Sosialisasi ke Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa

Sumber: KPU Kota Palembang

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh. Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena karena kecederungan mereka tidak dapat menggunakan hak pilih jika tidak ada keputusan bahwa penyelenggaraan pemilu sungguh aksesibel terhadap kebatasan yang mereka miliki. Maka dari itu, penyelenggara pemilu harus mensosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Contoh bentuk kegiatan basis ini adalah ke komunitas atau masyarakat penyandang disabilitas.[42]

[41]Ibid.,
[42]Ibid.,h.15

6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus

Gambar 3.9

Sosialisasi ke Panti Jompo Tresna Werdha

Sumber : KPU Kota Palembang

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang,lepas pantai dan lainnya. Pemilih bekebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karenaka minimnya informasi yang mereka dapatkan, salah satunya yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di tempat yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit di datangi. Contoh bentuk kegiatan basis adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke lapas, pegawai perkebunan sawit, dan masyarakat adat-adat.[43]

7. Basis Pemilih Marginal

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka bukan memiliki sumber daya, jaringan informasi, dan kepercayaan diri yang mencukupi. Mereka memiliki hak berpartisipasi yang sama dengan masyarakat lainnya. Tetapi situasi dan kondisi dikehidupan

[43]Ibid.,h.16

membuat mereka dalam posisi yang tidak lemah dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial danpolitik. Contoh bentuk kegiatan basis ini adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggiran,komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin , pemulung.

8. Basis Komunitas

Gambar 3.10

Sosialisasi ke Pedestrian Sudirman

Sumber: KPU Kota Palembang

Komunitas adalah kelompok orang yang saling peduli satu sama lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi hubungan yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen yaitu yang Pertama, berdasarkan lokasi, dimana sekelompok komunitas dapat dilihat sebagai tempat perkumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat kelompok yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hoby.

Komunitas secara umum jauh dari aktivitas politik, tapi mereka bukan berarti mereka miskin informasi politik. Tak jarang pula anggota-anggota komunitas membahas isu-isu politik terkini di tengah mereka menjalankan

aktivitas komunitasnya. Contoh bentuk kegiatan ini adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta makanan, komunitas olahraga, komunitas masyarakat jawa/minang/bugis dan lain sebagainya.

9. Basis Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh basis keagamaan selama ini ditujukan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang totalnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan kedepannya harus diubah menjadi gerakan popular. Distribusi dan konsumsi informasi pemilu dan demokrasi harus masuk ke dalam kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu harus dapat bergabung dengan kelompok keagamaan seperti pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh bentuk kegiatan basis ini adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke jamaah ssholat jumat, jamaah gereja/klenteng dan lainnya.

10. Basis Warga Internet (Netizen)

Peningkatan akses informasi menggunakan internet lalu bertambah setiap tahun. Melalui handphone, manusia zaman sekarang dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi. Persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara kepemiluan untuk menyongsong basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggaraan pemilu di semua satuan kerja mesti membentuk media komunikasi berbasis internet seperti website dan media

sosial seperti facebook, instagram dan lain-lainnya.[44]

Berikut ini adalah hasil dari pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui wawancara terhadap masyarakat yang mengetahui Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang:

Menurut Pak Reza selaku staff teknis mengatakan:

> *"Peran Relawan Demokrasi ini bagi kami sangat membantu dalam mensosialisasikan kepemiluan kepada masyarakat mbak, dan juga diharapkan masyarakat lebih menyadari tentang pentingnya pemilu karena itu untuk masa depan negeri kita sendiri"*[45]

Dari pendapat diatas mengatakan bahwa dengan adanya Program Relawan Demokrasi sangat membantu KPU Kota Palembang dalam menjalankan tugas mensosialisasikan pentingnya pemilu kepada masyarakat-masyarakat Kota Palembang.

Adapun tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang peran Relawan Demokrasi dalam menjalankan sosialisasi dari setiap basis:

Muhammad Rafly siswa dari MAN 1 Palembang mengatakan:

> *"Iyo kak kemaren kalu idak salah pas bulan februari atau maret kakak-kakak Relasi memang dateng ke sekolah kami mereka nyelasi tata cara pemilu dan jugo kan kemaren pas pemilihan surat suaro nyo ado limo kertas jadi dijelasi samo mereka, yo dengan datengnyo mereka kalo menurut aku pribadi kak cukup ngerti tapi karnokemaren lagi sibuk UN jadi yang lainnyo agak kurang memperhatikan apo yang disampaike kakak-kakak relasiitu"*
>
> *(Iya kak, memang benar kemarin waktu bulan februari atau maret*

[44]Ibid., h.18-29.
[45]Reza Ariansyah,Staff Teknis dan Hupmas, wawancara tanggal 16 september 2019

kakak-kakak Relawan Demokrasi datang ke sekolah kami mereka menjelaskan tata cara pemilu dan juga waktu pemilihan kemarin kan kita dihadapi dengan lima jenis surat suara jadi mereka menjelaskan. Kalau menurut saya pribadi kak dengan datangnya mereka cukup membantu,Cuma yang lainnya agak kurang memperhatikan karena kemarin sedang sibuk UN)[46]

Menurut peneliti, dari penjelasan siswa tersebut dia masih ingat dengan sosialisasi yang dilakukan Relawan Demokrasi tersebut. Dan juga Relawan Demokrasi ini di terima dengan baik oleh siswa/siswi di MAN 1, karena suasana UN jadi sosialisasi Relawan Demokrasi kurangmaksimal.

Menurut Subhan Robihan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang salah satu pemuda rantau yang berasal dari Medan mengatakan:

"Ya waktu pemilu serentak kemarin kebetulan saya tidak pulang kampung karena biaya pulang kampung mahal dan juga belum libur kuliah, datangnya Relawan Demokrasi ini cukup baik ya karena kemarin kami di ajak kumpul para pemuda-pemuda rantau UIN dijelaskan mereka bahwa memilih itu penting dan masih banyak lagi yang mereka jelaskan, namun kami ya rata-rata tidak ada yang pulang kampung untuk menyuarakan hak kami"[47]

Menurut peneliti, rata-rata pemuda rantau yang sedang mencari ilmu di Palembang ini tidak bisa menyuarakan haknya karena factor biaya dan juga jarak tempuh untuk mereka pulang kampung bukan karena mereka tidak mau memilih atau ikut dalam golongan putih karena mereka ada kendala tersendiri. Karena peran pemuda sangat penting dalam partisipasi

[46]Muhammad Rafly, Siswa MAN 1 Palembang, wawancara tanggal 18 september 2019
[47]Subhan Robihan, Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Wawancara tanggaegl 18 september 2019

pemilih.

Adapun Ibu Susi pengurus (TKS) Panti Jompo Tresna Wedha mengatakan:

> *"Yo kemaren apdo mereka dateng kesini,kedatangannyo bagus yo alhamdulillah padahal kami awalnyo dak tau kalo kertas suaro itu ado 5 limo ikok untunglah mereka dateng. Mereka galak dateng kesini rame-rame untuk ngebantu bapak/ibu di panti jompo ini untuk milih dan jugo ngejelasi dengan ramah tentang tata cara milih,tapi itulah ibu/bpk disini ado yang ngerti ado jugo yang samo sekali masih dak ngerti walawpun sudah dijelasi samo rombongan relasi itu kemaren, ado jugo yang marah-marah dak galak milih yo mungkin karno la tuo tu jadi yo maklumi ba, semoga bae mereka idak kapok dateng lagi kesini dalam pemiluselanjutnyo"*
>
> *(Iya mereka kemarin memang ada datang ketempat kami, bagus ya dengan kedatangan mereka kami jadi lebih mengerti memilih yang awalnya kami tidak tahu sama sekali bahwa memilih tahun ini dihadapkan dengan lima jenis kertas dan kami jadi mengerti dan tahu,mereka mau datang kesini ramai-ramai dan dengan ramahnya mereka menjelaskan tentang pentingnya memilih, tapi sayangnya bapak/ibu di panti ini ada yang mengerti adapun yang sama sekali tidak mengerti dengan penjelasan mereka tentang memilih. Semoga di tahun berikutnya mereka masih mau datang ke panti kami lagi)*[48]

Adapun nenek halimah yang tinggal di Panti Jompo mengatakan:

> *"Iyo inget kemaren nenek lihat mereka ngejelasi tentang pemilu,pokoknyo mereka ngebantu nenek caro-caro nyoblos, mereka tu maseh mudo galo ado wong 30an kalu dak salah"*

[48]Siti, Pengurus Panti Jompo Tresna Wedha (TKS), Wawancara tanggal 19 september 2019

(Iya kemarin nenek lihat mereka menjelaskan tentang pemilu,mereka sangat membantu nenek tata cara mencoblos,mereka semua masih kalangan muda)[49]

Menurut peneliti, dari jawaban Ibu Susi dan Nenek Halimah. Mereka masih antusias mengikuti pemilihan umum taun 2019 ini,walaupun dari segi umur sudah lansia tapi daya ingat mereka masih kuat dan juga mereka masih ingin melihat perubahan demi perubahan yang lebih baik lagi untuk negeri Indonesia.

Adapun salah satu warga di rumah susun yang tidak mau dipoto dan tidak memperkenalkan dirinya mengatakan:

"Jadi mbak kemarin kami mendapatkan pendidikan dari kakak-kakak Relawan Demokrasi, ya kami ini kan masyarakat miskin tidak tahu apa-apa kurang informasi,ya kurang semuanyalah informasi dan lainnya kami tidak tahu kan. Lalu juga ada warga di sini kemarin yang tidak mau ikut menyalurkan suara mereka karena merekasudah tidak percaya dengan kinerja pemerintah yang ujung-ujungnya hanya membuat harapan palsu.

Dengan datangnya Relawan Demokrasi tadi alhamdulillah sedikit demi sedikit kami jadi lebih tahu apa itu pemilu dan siapa-siapa saja yang mencalonkan diri,kami sangat berharap mbak kegiatan-kegiatan seperti Relawan Demokrasi ini bisa berjalan secara terus-menerus apa lagi ketika dalam pemilu,ya semoga kami yang masyarakat miskin ini yang kurang informasi dapat ikut berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu itu setidaknya suara kami tidak diambil oleh

[49]Halimah,Masyarakat Panti Jompo Tresna Wedha,wawancara tanggal 19 september 2019

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab"[50]

Menurut peneliti, dari jawaban masyarakat tersebut walaupun mereka orang pinggiran tapi mereka tahu bahwa pemilu tersebut penting. Mereka juga mempunyai kecerdasan yang tinggi karena mereka tidak ingin suara mereka di ambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ada juga masyarakat yang mengecap bahwa pemerintah terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri sehingga melupakan janji-janji mereka.

Adapun Resi Andita yang rutin mengikuti senam mengatakan:

"Kalau menurut saya sendiri ya mbak,kedatangan Relawan Demokrasi kemarin bagus ya mbak dan juga mereka punya ide untuk sosialisasi kesini khususnya ke perempuan, karena kan rata-rata perempuan ini sibuk semua apa lagi yang bekerja-bekerja,jadimereka mengingatkan kembali tentang pentingnya memilih dan juga jangan sampai golput"[51]

Menurut peneliti, kedatangan Relawan Demokrasi diterima baik oleh masyarakat yang mendapati sosialisasi tersebut. Jadi semuanya tergantung pada pemikiran masyarakat sendiri mau mencoblos atau tidaknya disela-sela kesibukan mereka.

Selanjutnya adrianto yang mempunyai keterbatasan fisik mengungkapkan:

"Kami ucapkan terimakasih kepada Relawan Demokrasi, alhamdulillah kemarin suara kami bisa tersalurkan untuk pemilu 2019,walawpun kami mempunyai keterbatas fisik tapi dibantu masyarakat-masyarakat khusunya Relawan Demokrasi.Seujujurnya

[50]Warga Rumah Susun, wawancara tanggal 19 september 2019
[51]Resi Andita, Peserta Senam Jantung, wawancara tanggal 20 september 2019

untuk pemilu kami memang tidak tahu apa-apa mbak apa lagi kan saya mengalami tuna netra saya tidak bisa melihat tentu saya hanya mendengarkan radio atau mendengarkan dari masyarakat-masyarakat sekitar,alhamdulillah kakak-kakak dari Relawan Demokrasi memberikan edukasi memberikan pendidikan terkait apa itu pemilu dan siapa-siapa saja yang mencalonkan diri dan itu sangat bermanfaat bagi kami"[52]

Menurut peneliti, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik tapi mereka masih berharap bisa terus menyalurkan aspirasi mereka ataumenyuarakan hak mereka untuk memilih. Dan mereka agar selalu dimbimbing dan diberikan edukasi-edukasi mengenai pemilihan umum.

Adapun iin yang berstatus ibu rumah tangga mengatakan:

"Pemilihan umum tahun ini memang agak sulit ya karena mencoblos lima jenis kertas suara jadi harus benar-benar teliti dalam memilih,kan sayang jika kertas tersebut hangus atau mendapat kesalahan dari kita. Dengan datangnya relawan demokrasi kemarin mereka menjelaskan kelima jenis kertas suara tersebut lalu mereka juga menjelaskan jika ada yang pindah memilih,ya termasuk bagus yah utusan dari KPU ini untuk membuat suatu program Relawan Demokrasi karena sangat membantu masyarakat dengan datangnya mereka"[53]

Dari hasil wawancara-wawancara yang telah peneliti lakukan, kehadiran Relawan Demokrasi mendapatkan respon yang sangat baik dari kalangan masyarakat Kota Palembang yang telah mendapatkan sosialisasi

[52]Adrianto, Warga yang mempunyai keterbatasan fisik, wawancara tanggal 20 september 2019
[53]Iin, peserta senam sehat sako, wawancara tanggal 21 september 2019

dan pendidikan dari anggota Relawan Demokrasi. Kehadiran mereka juga ada yang tidak diterima oleh masyarakat karena masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah dan mereka mengambil langkah untuk tetap tidak memilih.

Masyarakat berharap Program Relawan Demokrasi ini tetap berjalan pada pemilu-pemilu berikutnya karena kehadiran Relawan Demokrasi sangat membantu masyarakat dalam hal Pemilihan Umum,apalagi kepada masyarakat yang telah lanjut usia (lansia) disini kehadiran anggota Relawan Demokrasi sangat diperlukan untuk membimbing mereka melaksanakan pemilu.

Dengan hadirnya Program Relawan Demokrasi ini diharapkan dapat terus menurunkan tingkat golongan putih (golput) khususnya di Kota Palembang dan bisa membuat masyarakat percaya akan pentingnya memilih seorang pemimpin karena semua untuk negeri kita sendiri.

b. Hambatan yang dihadapi Relawan Demokrasi di Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu2019

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi menunjukan bahwa terdapat hambatan yang di rasakan oleh setiap anggota Relasi saat sosialisasi kepada masyarakat, hambatan serta kendala tersebut berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat sosialisasi dari masing-masing basis. Walaupun ada diantara mereka yang tidak mengalami kendala sama sekali saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berikut ini merupakan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing basis saat melakukan sosialisasi yaitu:

Hasil dari perwakilan basis Keluarga yaitu saudara Lili Andrean

mengatakan:

> *"Alhamdulillah, Selama kami melakukan sosialisasi tidak ada hambatan karena setiap ingin melakukan sosialisasi ke tempat yang dituju sudah ada teman di lokasi tersebut, jadi basis kami otomatis tidak susah lagi untuk bersosialisasi."*[54]

Adapaun menurut Fery selaku Ketua dari basis Keagamaan mengatakan:

> *"Ya selama berapa hari kami melakukan sosialisasi kami mendapatkan hambatan di bagian administrasi, karena suasana politik jadi sangat sensitif karena khawatir ada embel-embel lain yang kita bawa,tuturnya. Dan juga kami sangat berhati-hatiselama melakukan sosialisasi ini dikarenakan nanti kami berbicara yang dapat menyinggung terget yang kami temui karena terdiri dari agama yang berbeda"*[55]

Menurut Melisa Rusna perwakilan dari basis Pemilih Pemula mengatakan:

> *"Nah apo ye mbak hambatannyo, lancar-lancar be mbak hambatannyo dak adoalhamdulillah"*[57]
>
> *(Kami tidak mendapatkan hambatan, semuanya berjalan dengan lancar alhamdulillah)*

Lalu menurut Kurniawan anggota dari basis Marginal mengatakan:

> *"Hambatan pasti ada, yang pertama kebanyakan masyarakat itu sudah duluan mengecap bahwa KPU itu tidak independen, sehingga beberapa warga tidak peduli dengan kedatangan kita. Kedua, karena fokus kami ke masyarakat marginal/pinggiran, jadi mayoritas tingkatan ekonomi masyarakatnya rendah sehingga ketika inggin*

[54]Lili Andrean, basis keluarga, wawancara via telepon tanggal 22 september 2019
[55]Ferry Kurniawan, basis keagamaan, wawancara via telepon tanggal 22 september 2019

mengajak mereka dalam sosialisasi orientasi mereka dapat uang".[58]

Menurut Khoirul Mukmin selaku ketua dari basis Disabilitas ia mengatakan:

"Untuk hambatan di segmen disabilitas ini karena yang kami sosialisasikan adalah masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti tuna rungu, tuna netra, cacat fisik down sindrom. Jadi kami sedikit kesulitan materi yang akan kami sampaikan, dan kami akhirnya dibantu orang-orang yang spesialis untuk menterjemahkan sosialisasi tersebut."[56]

Menurut Bella Pitrina dari basis Internet mengatakan:

"Hambatan yang kami dapati itu yang pertama kurangnya minat warnet yang dapat menyumbangkan kreativitas yang mereka miliki untuk menyampaikan info mengenai pemilu. Kedua, sulit untuk mengubah pemikiran beberapa warnet tentang masalah hoax yang sedang menyebar di media sosial, karena mereka telah terlanjur termakan oleh hoax tersebut. Beberapa hoax nya itu tentang kotak suara yang terbuat dari kardus, orang gila bisa boleh memberikan hak suara, dallainnya."[57]

Menurut Yuvita Sari dari basis Pemilih Muda mengatakan:

"Hambatan nyo paling cuma kurangnyo kepedulian be dari sasaran kami kak, sisonyo yo oke bae."[58]

(Hambatannya cuma kurang kepedulian aja dari sasaran kak, sisanya oke aja).

Menurut Dita Putri Zatta dari basis Perempuan mengatakan:

"Karena kami sasarannya ke perempuan jadi hambatannya ya karena

[56]Melisa Rusna,basis pemilih pemula, wawancara via telepon tanggal 22 september 2019
[57]Bella Pitriana, basis marginal, wawancara via telepon tanggal 23 september 2019
[58]Yuvita Sari, basis pemilih muda, wawancara tanggal 23 september 2019

rata-rata mereka masih sibuk beraktivitas dengan pekerjaan mereka masing-masing jadi kami agak sulit untuk bertemu atau mengaturwaktu untuk melakukan sosialisasi ini"[59]

Menurut M.Mirza Wijaya dari basis berkenbutuhan khusus mengatakan:

"Karena kami dapatnya di basis ini jadi kami hambatannya agak kesulitan menjelaskan ke yang telah lanjut usia karena kami sosialisasinya ke panti jompo jadi rata-rata pendengaran mereka sudah terganggu,jadi kami harus dengan detail menjelaskan kepada mereka,akan tetapi memang itu yang menjadi tantangan bagi basis kami "[60]

Menurut Bj Habibie dari basis Komunitas mengatakan:

"Sebenernyo katek hambatan si kak, paling cuma kami kesusahan ngatur anak-anak komunitas karena kan komunitas nyo ado beberapo dan dalam sikok komunitas tu biso capai puluhan wong" [61] *(Sebenarnya tidak ada hambatan kak, paling kami kesusahan mengatur anak-anak komunitasnya. Karena komunitas nya ada beberapa dan dalam satu komunitas itu bisa capai puluhan orang)*

Dari hasil wawancara-wawancara yang saya lakukan kepada perwakilan-perwakilan setiap segmen Relawan Demokrasi ,karena ada beberapa anggota segmen yang diwawancarai melalui telepon karena mereka rata-rata mempunyai kesibukan masing-masing dan sulit untuk wawancara secara langsung. Dan juga mereka sudah tidak pernah berkumpul sesama segmen lagi karena mereka hanya bekerja selama beberapa bulan saja waktu pemilu serentak pada bulan april 2019 yang lalu.

[59]Dita Putri Zatta, basis perempuan, wawancara via telepon tanggal 22 september 2019
[60]M.Mirza Wijaya,basis bekebutuhan khusus, wawancara tanggal 24 september 2019
[61]Bj.Habibie, basis komunitas, wawancara via telepon tanggal 21 september 2019

Selama melakukan wawancara via telepon ada yang merespon sangat baik,tapi ada juga yang merespon dengan sangat singkat karena mungkin disisi lain mereka ada kesibukan tersendiri. Lalu dengan wawancara secara langsung peneliti bisa bertanya lebih dalam mengenai Relawan Demokrasi. Pada intinya, mereka semua melakukan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab walaupun dari setiap basis memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Dan program ini pada pemilu selanjutnya akan tetap di jalankan dengan anggota yang berbeda dan pihak KPU akan membukan pendaftaran peserta lagi.

Dari beberapa penelitian yang telah peneliti wawancarai basis yang paling mendapati hambatan yang cukup rumit adalah basis disabilitas karena sasaran mereka ialah untuk masyarakat berkebutuhan khusus sehingga mereka rumit untuk memberikan materi pendidikan pemilih tersebut kepada masyarakat berkebutuhan khusus itu,dan mereka masih dibantu oleh orang-orang spesialis penerjemah masyarakat itu sendiri agar mereka paham kedatangan anggota Relawan Demokrasi tersebut.

Relawan demokrasi dalam kapasitasnya sebagai ujung tombak pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang sangat berdampak signifikan bagi peningkatan partisipasi pemilih. Jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018 yang hanya 68,5%, sementara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih di Kota Palembang sebesar 82,19%.

Selanjutnya, jika kita melihat dari segi situasi objektif masyarakat, yaitu berbeda-beda sesuai dengan persepsi dari masing-masing masyarakat.

Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap calon pemimpin dan banyak pemimpin yang hanya mengutamakan kepentingannya sendiri ketika mereka memiliki jabatan tersebut.

Kemudian disebabkan juga karena adanya unsur kekhawatiran yang berlebihan dari masyarakat bahwa kegiatan pileg akan menghambat aktivitas mereka untuk bekerja atau mencari nafkah setiap harinya. Dengan kata lain kendalanya dalam hal ini yaitu terkait dengan pola pikir masyarakat yang sebagian kecil belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya demokrasi,tetapi sebagian besarnya lagi masyarakat masih ada untuk turut berpartisipasi dalam menyuarakan atau memberikan hak suaranya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019 menyimpulkan bahwa landasan terbentuknya program Relawan Demokrasi ini karena partisipasi pemilih yang cenderungmenurun. Sebelum turun ke masyarakat seluruh anggota Relawan Demokrasi terlebih dahulu diberikan bimtek sebelum hari pemilihan. Kemudian mekanisme yang digunakan oleh Relawan Demokrasi sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh dan telah mencapai sasaran, serta indikator yang diunakan oleh Relawan Demokrasi dalam mengevaluasi kinerja pun tepat, sehingga *feed back* dari kinerja tersebut sudah tercapai walaupun belum maksimal.

Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya yaitu bersosialisasi dan melakukan pendidikan kepada masyarakat mendapatkan nilai positif dan respon yang baik dari masyarakat-masyarakat Kota Palembang, karena anggota-anggota Relawan Demokrasi ini menjalankan tugas mereka dengan cukup baik dan penuh tanggung jawab. Kendala yang dihadapi dari segi anggota Relawan Demokrasi yaitu berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi namun pada umumnya adalah terkait dengan pola pikir masyarakat yang sebagian belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya demokrasi. Dengan demikian upaya yang dilakukan Relawan Demokrasi untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih ini berhasil sangat efektif dan berhasil mengenai sasaran.. Keberhasilan yang efektif ini

berdampak pada meningkatnya jumlah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di Kota Palembang sebagaimana dikemukakan oleh teori efektivitas dari Gibson.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan KPU Kota Palembang dapat terus membentuk Program Relawan Demokrasi.
2. Relawan Demokrasi Kota Palembang diharapkan masih terus bisa saling berkomunikasi antar anggota walaupun tugas telah selesai tapi silaturahmi masih tetap terjalin.
3. Program Relawan Demokrasi diharapkan menjadi satu langkah terobosan yang positif dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilu.

DOKUMENTASI

1
3
4
5

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulrahmat, (2003). Efektivitas Implementasi.

Handayaningrat, Soewarno, (1996). Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen.

Hadi, Sutrisno, (1987), Metodologi Reseach II, Yogyakarta: Andi Offiset.

Husaini, (2014). Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:Bumi Aksara).

Invancevich,JM JL, Gibson, Donnelly,JH (2001). Organisasi, terjemahan Agus Dharma.

Kothari C.R, (1990). *Research Methodologi*, Methods dan Techniques (Second Revises Edition), India: Age International

Martono, Nanang, (2015). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD.* Bandung: Alfabeta.

Siagian P. Sondang, (2002). Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja.

Steers M. Richard, (1999). Efektivitas Organisasi.

B. Website

Christian, Immanuel, *Menyikapi Proses dan Hasil Pemilu 2019*,http://m.rri.co.id/post/berita/663081/kolom_bicara/menyikapi_proses_dan_hasil_pemilu_2019.html, diakses tanggal 12 Juli2019

http://al-bantany-112.blogspot.com,2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Palembang, diakses tanggal 20 agustus 2019

https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah, diakses tanggal 17 september2019

https://halokawan.com/jumlah-daftar-nama-kecamatan-di-kota-palembang/, diakses tangga 17 september 2019

https://makassar.tribunnews.com/2019/03/08/tribunwikikapanterbentukny-komisi-pemilihan-umum-atau-kpu-apa-fungsinya-berikut-ulasannya?page=4, diakses tanggal 17 september 2019

https://kota-palembang.kpu.go.id/?page_id=191,diakses tanggal 18 september 2019

https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/Tugas-dan-Kewenangan,diakses tanggal 18 september 2019

https://kota-payakumbuh.kpu.go.id/?page_id=279, diakses tanggal 18 september

2019

https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/08/kpu-relawan-demokrasi-efektif-jalankan-tugasnya-sosialisasikan-pemilu-2019, diakses tanggal 20 september 2019

C. Jurnal

Herawati, Ratna.,Novira Maharani Sukma., Untung Dwi Hananto, (2018). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,*Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*,Volume IV nomor 3.

Huda, Khoiril, (2018). Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa,*Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume IV nomor 3.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, (2019). *Rumah Pintar Pemilu, Pedoman Pelaksanaan Relasi (RelawanDemokrasi) Pemilu* , Kaltim.

Komisi Pemilihan Umum, (2017). *Relawan Demokrasi (Relasi),"Relawan Pilgug DKI di Monas"*, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Liando, M Daud, (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, volume III nomor 2.

Triono, (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Wacana Politik*,Volume II nomor. 2,

Widyastuti, Wahyu Weni, (2014). Peran Relawan Demokrasi dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif di Kota Malang, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang*, Volume 1 nomor 1.

D. Wawancara

Andita, Resi, Peserta Senam Jantung, wawancara tanggal 20 september 2019

Adrianto, Warga yang mempunyai keterbatasan fisik, wawancara tanggal 20 september 2019

Ariansyah, Reza, Staff Teknis dan Hupmas, wawancara tanggal 16 september 2019

Andrean, Lili, basis keluarga, wawancara via telepon tanggal 22 september 2019

Habibie, BJ, basis komunitas, wawancara via telepon tanggal 21 september 2019

Halimah, Masyarakat Panti Jompo Tresna Wedha,wawancara tanggal19 september 2019

Iin, peserta senam sehat sako, wawancara tanggal 21 september 2019

Kurniawan, Ferry, basis keagamaan, wawancara via telepon tanggal 22 september 2019

Kurniawan, basis marginal, wawancara via telepon tanggal 23 september 2019

Khoirul, basis disabilitas, wawancara tanggal 24 september 2019

Pitriana, Bella, basis internet, wawancara via telepon tanggal 23 september 2019

Rafly, Muhammad, Siswa MAN 1 Palembang, wawancara tanggal 18 september 2019

Robihan, Subhan, Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Wawancara tanggal 18 september 2019

Rusna, Melisa, basis pemilih pemula, wawancara viatelepon tanggal 22 september2019

Siti, Pengurus Panti Jompo Tresna Wedha (TKS), Wawancara tanggal 19 september2019

Sari, Yuvita, basis pemilih muda, wawancara tanggal 23 september 2019

Wijaya, M.Mirza, basis bekebutuhan khusus, wawancara tanggal 24 september 2019

Warga Rumah Susun, wawancara tanggal 19 september 2019

Zatta, Putri, Dita, basis perempuan, wawancara via telepon tanggal 22 september 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B.1085/Un.09/VIII./TL.01/08/2019 30 Agustus 2019
Lampiran : -
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth,
KETUA KPU KOTA PALEMBANG
di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama	:	Yosi Witriya
NIM	:	1657020139
Semester	:	VII (Tujuh)
Prodi	:	Ilmu Politik
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan.

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan :
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Knowledge, Quality & Integrity

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354668 website : www.fisip.radenfatah.ac.id

Diunduh dengan Cam Scanner

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

Alamat : Jl. Mayor Santoso No.02 Kamboja Palembang
Telp: 0711-351709 Fax: 0711-378509

Palembang, 11 September 2019

Nomor : 536 /HM.03.4-SD/1671/Sek-Kot/IX/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Di
Palembang

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Fatah Palembang Nomor : B.1085/Un.09/VIII/TL.01/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian untuk Penulisan SKRIPSI untuk mengadakan penelitian/ observasi/wawancara/ pengambilan data, atas nama :

Nama	:	Yosi Witriya
NIM	:	1657020139
Semester	:	VII (Tujuh)
Program Studi	:	Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Peran Relawan Demokrasi di Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019

Pada prinsipnya Kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/observasi/wawancara/pengambilan data di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,

AHMADI DAMRAH

Tembusan disampaikan kepada :
- Yth. Ketua KPU Kota Palembang sebagai laporan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.1050 /Un.09/VIII/PP.01/08/2019
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga *ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung* jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik ***a.n: Yosi Witriya, 26 Agustus 2019***

MENGINGAT :
25. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
26. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
27. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
28. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
29. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
30. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

Pertama : Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Kun Budianto, M.Si	19761207200011010	Pembimbing I
Afif Musthofa Kawwami, M.Sos	2027029302	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Yosi Witriya
N I M : 1657020139
Prodi : Ilmu Politik
Judul Skrips : Peran Relawan KPU di Kota Palembang dalam meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu 2019
Masa bimbingan : **Satu Tahun TMT. 28 Agustus 2019 s/d 28 Agustus 2020**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 28 Agustus 2019
Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001

Tembusan:
1. Rektor ;
2. .Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. *Pembinbing Skripsi (1 dan 2)*
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Knowledge, Quality & Integrity
Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa	: Yosi Witriya
NIM	: 1657020139
Program Studi	: Ilmu Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Peran Relawan KPU di Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu 2019
Pembimbing I	: Dr. Kun Budianto, M.Si
Pembimbing II	: Afit Musthofa Kawwami, M.Sos

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	1-10-2019	Konsultasi Bab 1	
2.	3-10-2019	Penulisan Bab 2	
3.	7-10-2019	Konsultasi Bab 2	
4.	9-10-2019	Penulisan Bab 3	
5.	11-10-2019	Perbaikan Bab 3	
6.	14-10-2019	Konsultasi Bab 4	
7.	16-10-2019	ACC Bab 4	

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : YOSI WITRIYA
NIM : 1657020139
Program Studi : ILMU POLITIK
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Judul Skripsi : PERAN RELAWAN KPU DI KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2019
Pembimbing I : Dr. Kun Budianto, M.Si
Pembimbing II : Afif Musthofa Kawiwami M.Sos

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	27-8-2019	Revisi Latar belakang	[signature]
2.	3-9-2019	ACC BAB I	[signature]
3.	5-9-2019	Penjelasan gambaran dan sejarah kota palembang	[signature]
4.	12-9-2019	Revisi BAB II tentang sejarah Relawan demokrasi	[signature]
5.	16-9-2019	Acc BAB II	[signature]
6.	20-9-2019	Revisi Bab 3 tata Penulisan footnote diperbaiki.	[signature]
7.	24-9-2019	Revisi Bab 3 Setiap sub-sub di Perjelas	[signature]

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2020 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama	:	Yosi Witriya
Nomor Induk Mahasiswa	:	1657020139
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Peran Relawan KPU Di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,35. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Kun Budianto, M.Si	Pembimbing I	
2	Afif Musthofa Kawwami, M.Sos.	Pembimbing II	
3	Dr. Andi Candra Jaya, S.Ag., M.Hum	Penguji I	
4	Reni Apriani, M.Si	Penguji II	

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 28 Juli 2020

Ketua

Dr. Ahmad Syukri, S.IP, M.Si
NIP. 19770525 200501 1 014

Sekretaris

Ryllian Chandra Eka Viana, M.A.
NIP. 19860405201903101 1

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama	:	Yosi Witriya
Nomor Induk Mahasiswa	:	1657020139
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Peran Relawan KPU Di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2020 Setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,35

Palembang, 28 Juli 2020
Ketua Sidang

Dr. Ahmad Syukri, S.IP, M.Si
NIP. 19770525 200501 1 014

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama **:** Yosi Witriya

NIM **:** 1657020139

Tanggal Ujian Munaqosah **:** 28 Juli 2020

Judul Skripsi **:**

"Efektivitas Relawan Demokrasi Di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019"

Telah direvisi sesuai masukan dan saran pada saat ujian munaqosah dan telah disetujui oleh dosen penguji I dan dosen penguji II.

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Andi Candra Jaya,M.Hum	Penguji I	
2.	Reni Apriani,M.Si	Penguji II	

Palembang,28 Agustus 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dr. Kun Budianto,M.Si
NIP. 197612072007011010

Dosen Pembimbing II

Afif Musthofa Kawwami,M.Sos
NIDN.202709302